

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu modal terpenting pada proses pembangunan ekonomi suatu negara ada pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai *human capital* dapat mengelola sumber daya yang tersedia guna meningkatkan produktifitas pembangunan dan dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Schultz (1961) bahwa cara yang paling efisien untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan nasional suatu negara yakni salah satunya dengan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan menjadi kesempatan bagi setiap individu untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih layak melalui sumbangsuhnya pada aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan mereka dan akan berdampak pada perekonomian nasional.

Dikutip dari Buku *Potret Pendidikan Indonesia* (2019c) bahwa salah satu bentuk pemanfaatan fasilitas dan peningkatan kualitas pendidikan di suatu wilayah dapat dilihat melalui persentase partisipasi penduduk yang bersekolah. Akses pendidikan terutama bagi penduduk usia sekolah dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah atau selanjutnya disebut dengan APS yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 1. Rata-Rata APS Tahun 2015-2019 di Indonesia (Persentase)

Kelompok Usia (Tahun)	Pulau Sumatera	Pulau Jawa	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Pulau Maluku dan Papua	Nasional
07-12	99,55	99,43	99,07	99,12	98,81	94,41	99,16
13-15	95,85	96,59	96,70	94,42	92,60	92,49	95,11
16-18	75,80	74,11	77,85	71,78	71,57	74,55	71,44
19-24	24,45	26,91	26,93	24,13	27,32	30,96	24,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

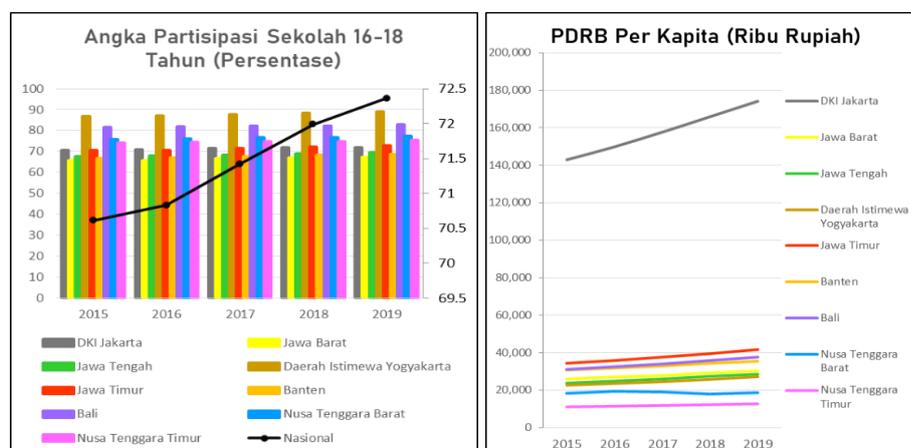
Dalam Tabel 1. di atas terlihat rata-rata APS kelompok usia 16-18 tahun lebih kecil dibandingkan rata-rata APS kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Nilai APS setiap pulaunya memiliki besaran yang berbeda karena adanya perbedaan

dalam kondisi demografi, SDM, SDA, budaya, sosial, ekonomi sampai kebijakan pemerintah setempat sehingga terjadinya kesenjangan antar wilayahnya. Secara umum, kesenjangan ini sangat terlihat di antara Pulau Jawa dengan rata-rata APS 74,11% lebih rendah sebesar 3,74% dibandingkan dengan Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki rata-rata APS sebesar 77,85%. Kesenjangan ini juga diperkuat dengan data dalam BPS (2020a) bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita periode 2015-2019 di Pulau Jawa sebesar 5%, dalam hal ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang hanya sebesar 4%.

Berdasarkan hal tersebut, Pulau Jawa dengan pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi seharusnya memiliki partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang juga tinggi, karena memiliki kemudahan dalam akses fasilitas pendidikan namun pada kenyataannya tidak demikian. Dibandingkan dengan Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki pertumbuhan PDRB per kapita lebih rendah dari Pulau Jawa justru mempunyai tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi. Fenomena inilah yang mendasari peneliti memilih seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebagai lokasi penelitian. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebagai salah satu bentuk input modal manusia dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu rendahnya pendapatan masyarakat akan menyulitkan mereka untuk mengakses fasilitas pendidikan, tingginya tingkat kemiskinan juga bisa menjadi salah satu penyebabnya sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Di sisi lain, tertera jelas pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 bahwa dalam menjalankan fungsi satuan pendidikan diperlukan fasilitas dasar yakni prasarana pendidikan (BPS, 2019c). Berdasarkan hal tersebut, secara tidak langsung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang baik melalui anggaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Adapun jumlah tenaga pendidik yakni guru juga tidak kalah penting sebagai salah satu yang berkontribusi dalam majunya suatu pendidikan karena guru secara langsung dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Berkaitan dengan hal-hal di atas, perkembangan faktor-faktor tersebut terlihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 1. PDRB per Kapita dan APS Tingkat Provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan Grafik 1. di atas terlihat perkembangan PDRB per kapita yang menunjukkan tren positif, namun laju peningkatan ini cukup lambat hanya sebesar kurang dari 3% di setiap tahunnya dan besaran jumlah PDRB per kapita setiap provinsi yang ada juga berbeda. PDRB per kapita sebagai bagian dari upah atau pendapatan yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan produktivitas atau pekerjaan yang dimiliki seseorang. Hal tersebut didasari oleh pernyataan Smith yang mengatakan bahwa pada pekerjaan yang sulit dipelajari, upahnya akan lebih tinggi. Hal-hal yang dipelajari tersebut dapat diperoleh dari lingkup pendidikan, termasuk sekolah. Hal ini dikarenakan tantangan pekerjaan itu sendiri yang perlu dipelajari sehingga tingginya partisipasi masyarakat dalam pendidikan secara tidak langsung akan mendorong terwujudnya upah atau pendapatan yang lebih tinggi.

Terlihat dalam Grafik 1. bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) rata-rata PDRB per kapita terbesar ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 158.078 dan rata-rata APS hanya sebesar 71,38%, sementara itu rata-rata PDRB per kapita terkecil ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 11.882 dan rata-rata APS sebesar 74,73%. Berdasarkan data tersebut, PDRB per kapita terbesar ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan APS yang lebih rendah 3,35% dari APS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki PDRB per kapita terkecil. Kecilnya PDRB per kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur disebabkan karena mayoritas penduduknya menerima penghasilan dari bertani yang tidak mencukupi untuk

Eka Yulia Ningsih, 2022

DETERMINAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) TINGKAT PROVINSI DI PULAU JAWA, BALI, DAN NUSA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

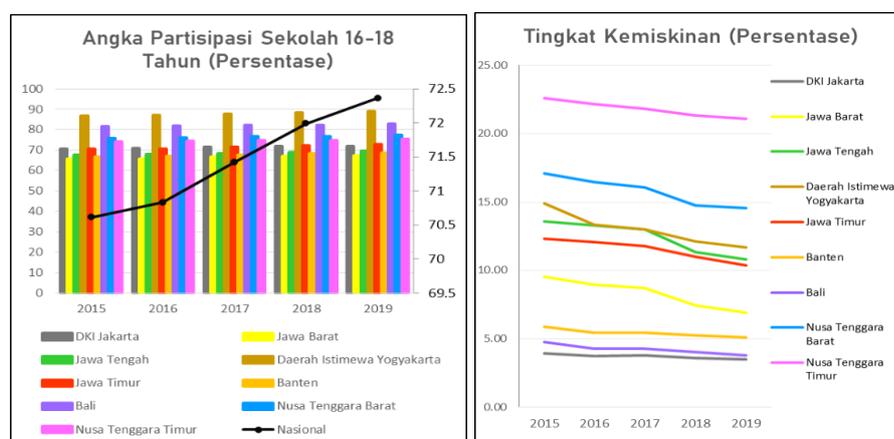
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kebutuhan sehari-hari mereka (Putra et al., 2019). Kecilnya PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mematahkan semangat masyarakatnya untuk mengenyam pendidikan karena didukung oleh program Gong Belajar dengan pemusatan jam belajar selain di sekolah juga di rumah saat malam hari, sehingga setiap orang tua ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini tercermin dari APS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih tinggi dari APS Provinsi DKI Jakarta yang memiliki PDRB per kapita terbesar.

Besarnya PDRB per kapita di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh banyaknya kontribusi sektor perdagangan yakni sebesar 29,66% terhadap PDRB per kapita wilayahnya (Irawan, 2020). Besarnya PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta, tidak diiringi dengan APS yang tinggi karena jumlah sekolah yang ada tidak bisa menampung seluruh masyarakat usia sekolah akibat tingginya pertumbuhan penduduknya setiap tahun. Berbeda dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki APS tertinggi setiap tahunnya, namun PDRB per kapita wilayahnya terkecil ketiga yang dikarenakan upah yang diterima para pekerja juga rendah sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk warganya yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dengan syarat sudah memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) dan menyebabkan APS wilayahnya dapat dipertahankan menjadi tertinggi di setiap tahunnya (Hasanah & Jabar, 2017).

Adapun hal berbeda terjadi dengan PDRB per kapita Provinsi Bali yang menempati posisi ketiga terbesar dan memiliki APS tertinggi kedua setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikarenakan oleh Provinsi Bali merupakan daerah pariwisata yang menjadi tujuan turis asing maupun dalam negeri untuk berlibur sehingga turut mensejahterakan masyarakatnya melalui tingginya pendapatan yang mereka terima sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya. Kemampuan masyarakat tidak hanya terlihat dari PDRB per kapitanya saja, namun terlihat juga pada tingkat kemiskinan dengan perkembangannya tertera pada grafik berikut ini.

Grafik 2. Tingkat Kemiskinan dan APS Tingkat Provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Terlihat dalam Grafik 2. di atas bahwa setiap provinsi yang ada berhasil menurunkan tingkat kemiskinan penduduknya dengan rata-rata penurunan setiap tahunnya sebesar 0,4%, namun tingginya tingkat kemiskinan masih terjadi di beberapa provinsi. Tingginya tingkat kemiskinan menurut Nurkse dapat menjadikan masyarakat miskin hidup dengan pendapatan yang rendah dan secara tidak langsung dapat menghambat masyarakat untuk mengakses pendidikan dan akhirnya memiliki produktivitas yang rendah namun dalam hal ini tidak terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2015-2019 sebesar 21,82%, dikarenakan akses pada pelayanan publik maupun pemerintah pusat yang kurang memadai dan juga beberapa daerahnya terisolasi dan terbelakang dari daerah lainnya (Kennedy et al., 2019).

Keterbatasan fasilitas publik tersebut tidak membuat masyarakatnya menyerah dalam menimba ilmu, hal ini terlihat dari rata-rata APS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 74,73%, masih lebih tinggi dari rata-rata APS nasional yang hanya sebesar 71,44%. Hal tersebut terjadi dikarenakan sosialisasi pentingnya pendidikan dari lembaga setempat mampu memotivasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya. Berbeda dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki APS tertinggi dan tingkat kemiskinan dengan posisi tiga teratas dikarenakan lambannya pertumbuhan ekonomi daerahnya yang hanya ditopang oleh sektor industri skala rumah tangga dan pertanian. Hal berbeda terjadi

Eka Yulia Ningsih, 2022

DETERMINAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) TINGKAT PROVINSI DI PULAU JAWA, BALI, DAN NUSA TENGGARA

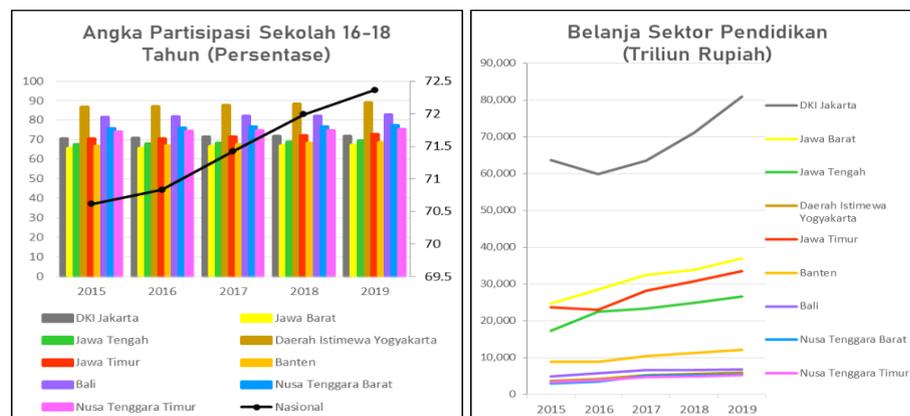
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pada Provinsi Bali dengan tingkat kemiskinan terendah kedua karena Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena tetap menjaga kelestarian budaya dan unggul dalam pariwisatanya sehingga masyarakatnya sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya serta secara tidak langsung menjadikan APS wilayahnya bertahan dalam urutan tertinggi kedua di setiap tahunnya.

Adapun selain PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan erat kaitannya dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah karena pendidikan termasuk kebutuhan masyarakat yang tergolong dalam barang publik sehingga penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 menjelaskan terkait perencanaan keuangan fungsi pendidikan, di mana tertera bahwa sedikitnya 20% dari APBN dan APBD diperuntukkan bagi anggaran pendidikan (DPRD Provinsi, 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dalam proses mewujudkannya, belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan terlihat perkembangannya pada grafik di bawah ini.

Grafik 3. Belanja Sektor Pendidikan dan APS Tingkat Provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS dan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2021

Berdasarkan Grafik 3. di atas terlihat perkembangan belanja sektor pendidikan di setiap provinsi menunjukkan tren positif, namun cukup berfluktuasi pada beberapa wilayahnya. Belanja sektor pendidikan termasuk dalam fungsi alokasi menurut Musgrave karena belanja sektor pendidikan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik masyarakat. Hal ini secara implisit

Eka Yulia Ningsih, 2022

DETERMINAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) TINGKAT PROVINSI DI PULAU JAWA, BALI, DAN NUSA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menunjukkan bahwa jika pengeluaran anggaran pemerintah digunakan secara efektif dan efisien maka kebutuhan publik masyarakat salah satunya yaitu pendidikan dapat terpenuhi, sehingga akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Sayangnya hal ini tidak terjadi di Provinsi Jawa Barat, dimana terlihat dalam Grafik 4. di atas bahwa Provinsi Jawa Barat menempati provinsi terbesar kedua belanja sektor pendidikannya setelah Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir (2015-2019) yang digunakan untuk fokus pada pembangunan ruang kelas dan sekolah baru serta fasilitas pendidikan lainnya namun hal ini tidak membantu peningkatan APS Provinsi Jawa Barat yang masih terendah di setiap tahunnya. Peserta didik tamat SMP yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke SMA/SMK/Sederajat memiliki jumlah yang banyak sehingga turut menjadi penyebab rendahnya APS Provinsi Jawa Barat (Novitasari & Hapitri, 2019).

Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki belanja sektor pendidikan terbesar kedua dan APS terendah di setiap tahunnya, APS tertinggi yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta justru memiliki belanja sektor pendidikan terkecil ketiga di setiap tahunnya. Kecilnya belanja sektor pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan tingginya porsi belanja modal yakni dari pos belanja pegawai dalam APBD (BPS DIY, 2020). Begitupun pada Provinsi Bali yang memiliki belanja sektor pendidikan kecil dikarenakan APBD yang didominasi oleh presentase belanja pegawai hingga mencapai 36,49% pada tahun 2019 (BPS Bali, 2020). Adapun Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki belanja sektor pendidikan terendah di setiap tahunnya dikarenakan yang diperhitungkan dalam Neraca Pendidikan (NPD) hanya belanja langsung namun nilai anggaran belanja daerah untuk dana sertifikasi dan Bantuan Operasional Sekolah memiliki alokasi terbesar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Wulandya et al., 2020).

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga tidak terlepas dari peran penting tenaga pendidik yakni guru di dalamnya karena guru terlibat langsung dalam pembelajaran di sekolah, termasuk pada jenjang pendidikan SMA/SMK yang mayoritas ada pada kelompok usia 16-18 tahun. Adapun jumlah tenaga pendidik setiap tahun terlihat dalam grafik berikut.

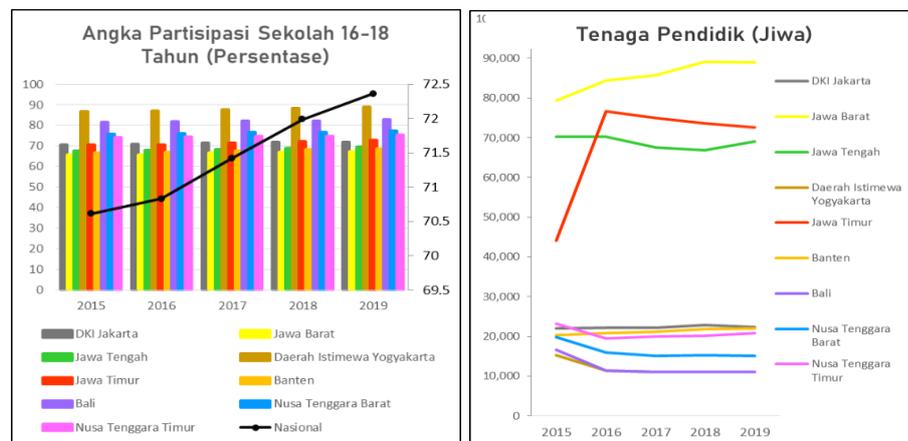
Eka Yulia Ningsih, 2022

DETERMINAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) TINGKAT PROVINSI DI PULAU JAWA, BALI, DAN NUSA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Grafik 4. Jumlah Tenaga Pendidik dan APS Tingkat Provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021

Terlihat dalam Grafik 4. di atas bahwa persebaran jumlah tenaga pendidik yakni guru berbeda di setiap tahunnya pada setiap provinsi yang ada. Menurut Diat Prasajo et al. (2017) dalam *Manajemen Strategi Human Capital dalam Pendidikan*, tertulis bahwa adanya dampak positif bagi perkembangan organisasi yakni lembaga pendidikan akibat dari perkembangan tenaga pendidik secara kolektif. Berdasarkan hal tersebut, dengan jumlah tenaga pendidik yang memadai akan mendukung perkembangan pendidikan karena tenaga pendidik tersebut secara tidak langsung dapat menjawab permintaan kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam Grafik 4. diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik tertinggi ada pada tahun 2018 ditempati oleh Provinsi Jawa Barat karena adanya penambahan jumlah tunjangan tenaga pendidik/guru untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong naiknya partisipasi sekolah di Provinsi Jawa Barat karena akan ada lebih banyak lagi guru yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan namun sayangnya APS wilayahnya masih terendah di tahun yang sama dikarenakan masih terus diupayakan peningkatan mutu, kualitas, dan kuantitas sarana prasarana pendidikan bagi penduduk setempat. Berbeda halnya dengan Provinsi Bali yang memiliki jumlah tenaga pendidik/guru sedikit dikarenakan banyaknya guru yang pensiun dan belum ada penggantinya. Adapun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga memiliki jumlah tenaga pendidik/guru sedikit ketiga terbawah dikarenakan tidak

Eka Yulia Ningsih, 2022

DETERMINAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) TINGKAT PROVINSI DI PULAU JAWA, BALI, DAN NUSA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ada rekrutmen tenaga pendidik baru yang dilakukan sehingga formasi jumlah guru tidak berimbang dengan jumlah siswa namun jumlah sekolah yang ada masih bisa menampung penduduk usia sekolah sehingga mampu meningkatkan APS wilayahnya dalam urutan tiga teratas.

Penelitian mengenai APS telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian Suwandana (2018) mengungkapkan bahwa PDRB per kapita dan persentase penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap APS. Adapun penelitian yang dinyatakan oleh Rahmatin & Soejoto (2017) bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan negatif terhadap APS. Penelitian oleh Sartiyah et al. (2017) menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan dalam pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan tingkat melek huruf dan tingkat partisipasi dalam pendidikan. Penelitian Mutuku & Korir (2019) menyatakan bahwa jumlah guru, kelas, buku, dan ketersediaan toilet sebagai karakteristik dari sekolah berpengaruh signifikan positif terhadap partisipasi dan kualitas pendidikan.

Merujuk pada uraian di atas, terdapat permasalahan yaitu adanya ketidaksamaan antara teori dan data serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat Provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara”**

I.2. Perumusan Masalah

Banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam suatu daerah dapat terlihat dari APS namun selama tahun 2015-2019 APS tingkat provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menunjukkan peningkatan yang relatif stagnan. Penyebabnya yaitu rendahnya PDRB per kapita menyulitkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan, kemudian tingginya kemiskinan juga menjadi salah satu hambatan seseorang untuk melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, jumlah belanja sektor pendidikan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya fokus pada pembangunan sarana pendidikan beserta jumlah tenaga pendidik/guru yang tidak merata untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di beberapa provinsi dalam Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara turut

menjadi penyebabnya. Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap APS?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap APS?
3. Bagaimana pengaruh belanja sektor pendidikan terhadap APS?
4. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga pendidik terhadap APS?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap APS.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap APS.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja sektor pendidikan terhadap APS.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga pendidik terhadap APS.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap APS.
2. Aspek Praktis
 - a) Bagi pemerintah, agar menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah pendidikan sehingga peningkatan partisipasi pendidikan dapat terwujud dan SDM yang ada dapat menjadi modal atau *human capital* yang berkontribusi dalam pembangunan negara.
 - b) Bagi masyarakat, agar memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pendidikan yakni APS dan diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.